

Media Cetak	Tribun Timur
Tanggal	Jumat 29 November 2024
Wilayah	Kota Makassar



Proyek Karebosi Putus Kontrak, Pemkot *Blacklist* PT Arkindo

# Proyek Karebosi Putus Kontrak, Pemekot *Blacklist* PT Arkindo

**MAKASSAR, TRIBUN** - Pelaksana proyek revitalisasi Lapangan Karebosi Makassar, PT Arkindo masuk dalam daftar hitam (*blacklist*) Pemerintah Kota Makassar.

Pemekot Makassar dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar telah memutuskan kontrak dengan PT Arkindo atas revitalisasi Lapangan Karebosi yang dikerjakan.

Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Makassar, Andi Tenri Lengka mengatakan, pemutusan kontrak dilakukan sejak 22 November lalu.

Pemutusan kontrak dilakukan karena kontraktor tak menyelesaikan pekerjaan sesuai target dan kesepakatan.

"Persentase capaian action plan yang disepakati pelaksana antara bobot target dan bobot realisasi secara keseluruhan belum tuntas dan

tercapai," ucap Andi Tenri Lengka, Kamis (28/11).

Sebelum pemutusan kontrak, PPK telah melakukan rapat show case meeting (SCM) dan memberikan peringatan atau teguran kepada pelaksana proyek.

Surat peringatan pertama dikeluarkan pada 25 Juli, kedua pada 7 November lalu, dan peringatan ketiga pada 22 November

"Berdasarkan pertimbangan hasil evaluasi SCM dan surat peringatan yang diberikan, penyedia tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam setiap tahapan SCM," ujar Engka-sapaannya.

Menurutnya, PT Arkindo telah gagal memperbaiki kinerjanya usai mendapat surat peringatan kontrak kritis sebanyak tiga kali.

Penyedia dinilai lalai atas janji dalam melaksanakan

kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaian dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Karenanya, PT Arkindo dianggap tidak mampu menyelesaikan seluruh pekerjaan 100 persen sesuai target.

"Pelaksana di *blacklist* dan sementara dilengkapi segala administrasi sesuai dengab LKPP nomor 4 tahun 2021 tentang pembinaan pelaku usaha pengadaan barang dan jasa pemerintah," sebutnya.

Adapun anggaran Revitalisasi Karebosi sebesar Rp73 miliar. Engka mengklaim bahwa Dispora tak pernah membayarkan termin selain uang muka sebesar 15 persen.

Selama proyek ini berjalan, pihaknya mendapat pendampingan dari kejaksaan, LKPP Pusat, Polda, BPK, BPKP, dan KPK. (ami)